



Kementerian PPN/
Bappenas

RINGKASAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024



***Mempercepat Transformasi
Ekonomi yang Inklusif
dan Berkelanjutan***

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Kementerian PPN/
Bappenas



Pembangunan Indonesia bagaikan sawah yang subur. Setiap langkahnya adalah benih-benih harapan yang tumbuh menjadi padi-padi emas. Seperti akar yang menghunjam dalam, semangat pembangunan meresap ke bumi hati rakyat, menciptakan panen kemajuan yang melimpah ruah.



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



RINGKASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

*Mempercepat Transformasi
Ekonomi yang Inklusif
dan Berkelanjutan*

RINGKASAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

DISUSUN OLEH:

- Tim Kementerian PPN/Bappenas

EDITOR:

- Kedeputan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
- Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan

IDE DAN KONSEP:

- Alex Oxtavianus
- Afwandi
- Bambang Triyono
- Chairul Rijal
- Nuzula Anggeraini
- Ladislaus Ryanniro Tumanggor
- Ultamas Eka Rahmawan
- Granaya Talitha Nindya Zaski
- Caroline Fadhillah Agnestina H
- Lenna Kurnia Wijaya
- Aulia Dwi Safira
- Ni'mah Ziyah Atiqoh

DESAIN DAN TATA LETAK:

- Reza Andika Putra



KATA PENGANTAR

Patut kita menaikkan puji dan syukur kepada Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan rida-Nya, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dapat diselesaikan tanpa ada kendala yang berarti.

Sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan nasional, RKP Tahun 2024 berkomitmen untuk memberikan arahan pada kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional. Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2023. Setelah ditetapkannya UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, RKP kembali dimutakhirkan.

Negara kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Sejak tahun 2020, seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19 yang belum pulih hingga saat ini. Kemudian, muncul tantangan akibat perang yang menyebabkan krisis pangan, krisis energi, bahkan krisis keuangan yang juga berdampak di banyak negara. Akan tetapi, pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk merespons berbagai tantangan tersebut dengan menempatkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Oleh sebab itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” sebagai tongkat estafet keberlanjutan pembangunan yang harus terus dibawa menuju pencapaian cita-cita berbangsa dan bernegara. Tema pembangunan tersebut menekankan terwujudnya stabilitas di berbagai



bidang pembangunan, yakni sebagai fondasi bagi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang aman dan kondusif. Selain itu, penekanan diberikan pada urgensi percepatan transformasi ekonomi serta pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 memuat 44 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) yang mendukung pencapaian sasaran tujuh Prioritas Nasional (PN), dengan 16 MP yang menjadi penekanan (highlight). Penajaman MP dilakukan melalui mekanisme Clearing House (CH) yang telah dimulai pada RKP Tahun 2022. Mekanisme itu tetap dilaksanakan dan dipertajam pada RKP Tahun 2024 dengan tujuan menjamin tercapainya output MP dan dipastikan agar bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024.

Akhirnya, kami berharap dokumen ini dapat dijadikan pedoman bagi seluruh stakeholder dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh sektor dan level pemerintahan, termasuk badan usaha dan Non-State Actor untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendorong peningkatan produktivitas guna mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bersama kita bisa untuk Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur di tahun 2045.

SUHARSO MONOARFA

Menteri PPN/





5

Kata Pengantar

6

Daftar Isi

8

Proses Penyusunan RKP
2024

10

Tema, Arah Kebijakan, dan
Strategi Pembangunan
RKP Tahun 2024

13

Sasaran Pembangunan

DAFTAR ISI

Kepalas





14

Sasaran Pembangunan Wilayah

16

Strategi Pendanaan Pembangunan

19

Highlight 16 Major Project

38

Prioritas Nasional

54

Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan



PROSES PENYUSUNAN RKP 2024



Rancangan Awal RKP 2024

Rancangan RKP Tahun 2024





RKP Tahun 2024



Pemutakhiran RKP Tahun 2024



TEMA, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN RKP TAHUN 2024

Penetapan tema RKP 2024 mempertimbangkan arahan presiden, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022, serta kerangka ekonomi makro. Selain itu, mempertimbangkan Pemilu di Tahun 2024, dinamika ketidakpastian global dan isu strategis lainnya, serta konsistensi dengan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024.

Tema RKP Tahun 2024

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan



Mewujudkan Stabilitas di Berbagai Bidang Pembangunan

Sebagai fondasi bagi penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang aman dan kondusif.

Percepatan Transformasi Ekonomi

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; serta
Penguatan daya saing usaha.

Pembangunan Inklusif

- Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; serta
- Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat dalam infografis di bawah ini.

Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

- ▶ Memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial;
- ▶ Konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial;
- ▶ Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan;
- ▶ Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan;
- ▶ Peningkatan kualitas konsumsi pangan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

- ▶ Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
- ▶ Reformasi sistem perlindungan sosial;
- ▶ Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- ▶ Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- ▶ Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- ▶ Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan

- ▶ Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok;
- ▶ Menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional.

Penguatan Daya Saing Usaha

- ▶ Meningkatkan kualitas teknologi informasi;
- ▶ Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif;
- ▶ Mewujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif;
- ▶ Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi;
- ▶ Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.

Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi

- ▶ Melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir);
- ▶ Konservasi lahan produktif;
- ▶ Memperkuat transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan;
- ▶ Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

- ▶ Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh;
- ▶ Meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat Air;
- ▶ Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah;
- ▶ Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi;
- ▶ Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan (3TTP).

Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

- ▶ Membangun gedung pemerintahan dan hunian;
- ▶ Membangun infrastruktur utama.

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024

- ▶ Mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal;
- ▶ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan;
- ▶ Mengamankan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024;
- ▶ Mendukung penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.



Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2024.



SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah

- (1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Lebih lanjut, target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2024 ditunjukkan oleh infografis sebagai berikut.



SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Pengembangan wilayah tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah, meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah, serta mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.





Sulawesi

Pertumbuhan Ekonomi (%)

2024 ▶ 7,5-8,5

Tingkat Kemiskinan (%)

2024 ▶ 7,8-8,5

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

2024 ▶ 3,0-3,8

Maluku

Pertumbuhan Ekonomi (%)

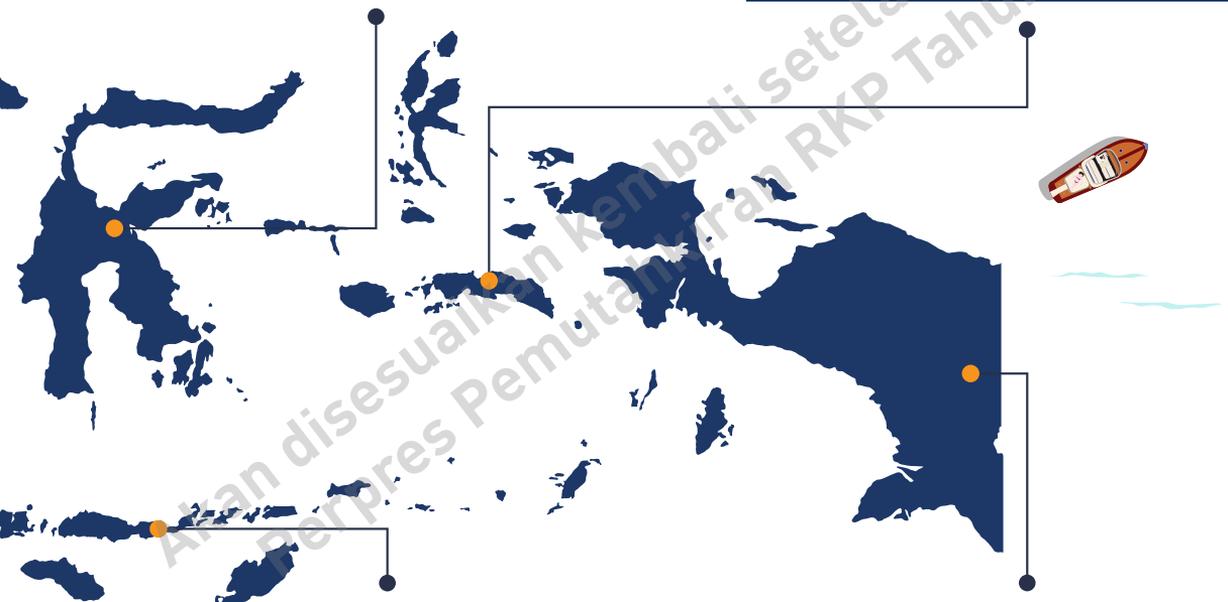
2024 ▶ 12,7-17,0

Tingkat Kemiskinan (%)

2024 ▶ 9,5-10,0

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

2024 ▶ 4,5-5,3



Nusa Tenggara

Pertumbuhan Ekonomi (%)

2024 ▶ 4,1-4,9

Tingkat Kemiskinan (%)

2024 ▶ 14,5-15,0

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

2024 ▶ 2,1-2,8

Papua

Pertumbuhan Ekonomi (%)

2024 ▶ 3,9-4,9

Tingkat Kemiskinan (%)

2024 ▶ 22,5-23,0

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

2024 ▶ 2,4-3,1



STRATEGI PENDANAAN PEMBANGUNAN

Prioritas Pemanfaatan Pendanaan Pembangunan



Pendanaan dalam RKP Tahun 2024 difokuskan pada

1. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
2. Pemilihan Umum tahun 2024;
3. Percepatan transformasi ekonomi;
4. Percepatan pemulihan ekonomi dengan sumber utama berasal dari APBN; dan
5. Pembiayaan MP, khususnya yang memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemulihan ekonomi seperti pariwisata, pembangunan infrastruktur daerah, dan industri.

Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Pendanaan

Strategi yang dilakukan untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan, di antaranya



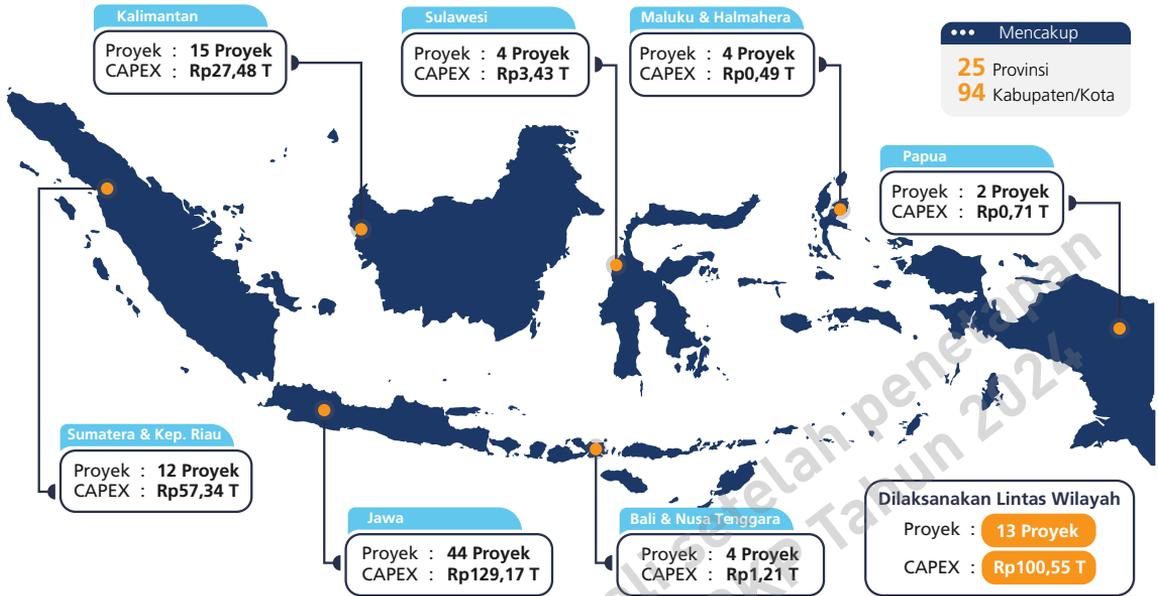
Kontribusi Badan Usaha Milik Negara dalam Prioritas Nasional



Sumber: BUMN terkait dan hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas, 15 November 2023.

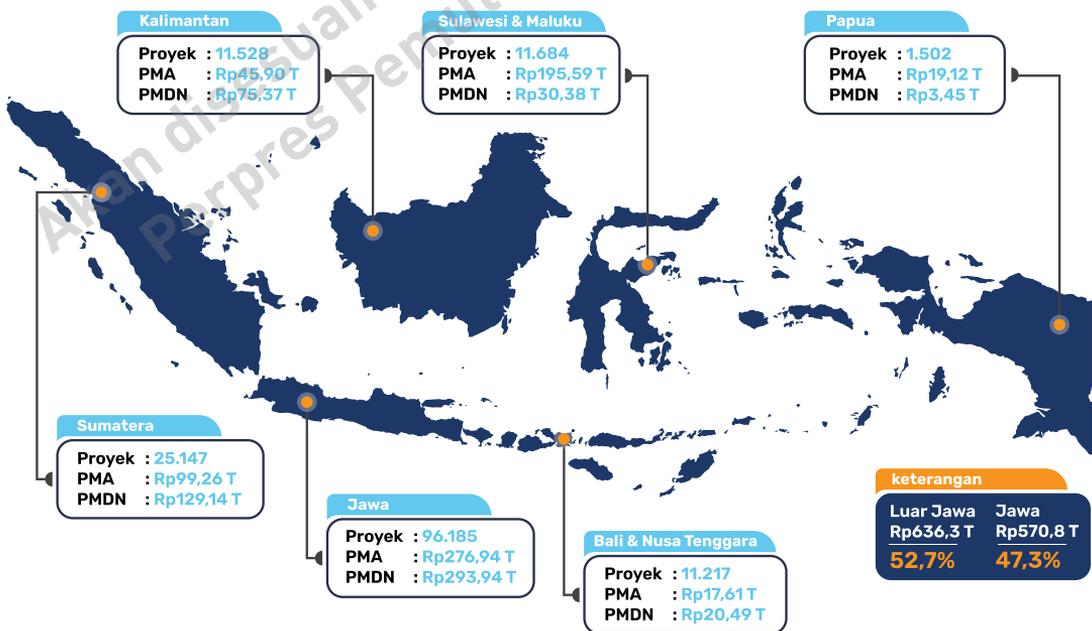


Sebaran Proyek Prioritas Investasi BUMN di Seluruh Indonesia



Sumber: BUMN terkait dan hasil identifikasi Kementerian PPB/Bappenas 15 November 2023.

Sebaran Spasial Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2022



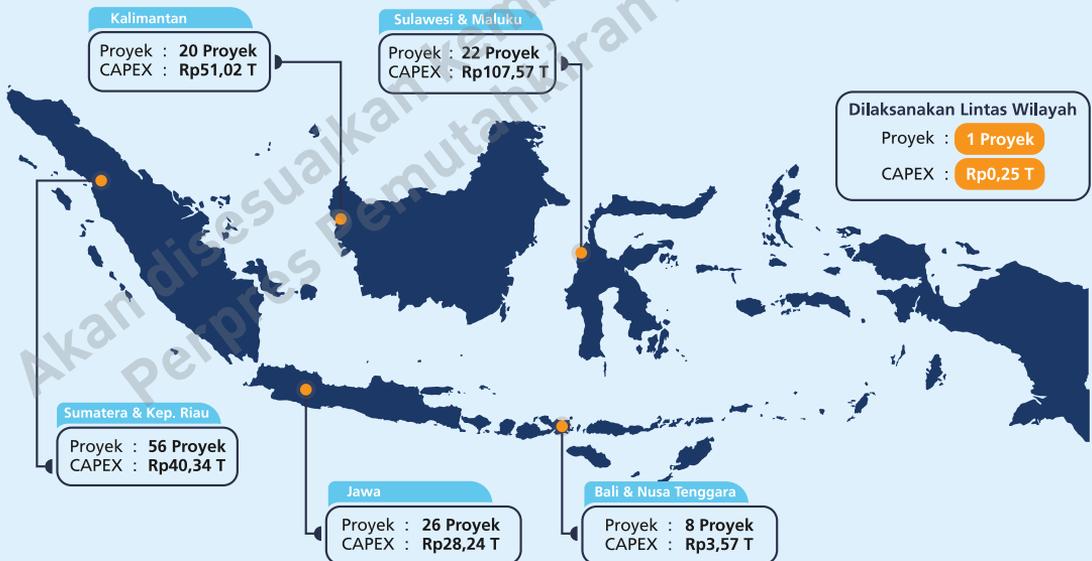
Sumber: Data statistik NSWI, Februari 2023.

Kontribusi Swasta dalam Prioritas Nasional



Sumber: Hasil identifikasi Kementerian PPB/Bappenas.

Sebaran Proyek Prioritas Investasi Swasta di Seluruh Indonesia



Sumber: Hasil identifikasi Kementerian PPB/Bappenas 15 November 2023.



HIGHLIGHT 16 MAJOR PROJECT



Kawasan Industri Prioritas dan Smelter

Major Project ini dilatarbelakangi oleh beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam perekonomian Indonesia, yaitu penurunan kontribusi PDB industri pengolahan di bawah nilai 20%, dengan pertumbuhan PDB yang lebih rendah dari pertumbuhan nasional; kontribusi ekspor industri Indonesia masih belum mencapai tingkat yang diharapkan jika dibandingkan dengan negara setara; masih rendahnya investasi yang mendukung hilirisasi sumber daya alam,

termasuk mineral; perlu adanya peningkatan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi di luar Pulau Jawa untuk meratakan pertumbuhan ekonomi di seluruh negeri. Terakhir, tingginya ketergantungan pada impor, di mana sekitar 76,3% dari impor Indonesia adalah bahan baku dan produk antara untuk industri, menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius.

➤ **Impact/outcome**

- Meningkatkan pertumbuhan PDB industri pengolahan menjadi 5,4-5,8% dan kontribusi PDB industri pengolahan menjadi 19,9-20,5%;
- Tercapainya realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan sebesar Rp662,7-Rp754,1T;
- Meningkatkan serapan tenaga kerja industri pengolahan menjadi 22,50 juta orang;
- Sebanyak 14 KI Prioritas dan 31 Smelter prioritas yang beroperasi di akhir tahun 2024.

➤ **Highlight Proyek**

Peningkatan Investasi

- Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS);
- Percepatan Rencana Proyek Strategis di bidang jasa dan kawasan;
- Fasilitasi Investor Dalam Rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni.

Promosi Ekspor

- Analisis Negara Target dan Negara Pesaing;
- Rekomendasi Kebijakan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan;
- Penanganan Kasus *Trade Remedy* dan Hambatan Teknis Perdagangan.



Harmonisasi Regulasi

- Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri;
- Tingkat Implementasi P3DN dan Peningkatan TKDN pada Sub Sektor Pertambangan Mineral;
- Rumusan Kebijakan Pembinaan BUMN dalam Rangka Hilirisasi Bahan Tambang.

Infrastruktur dalam Kawasan

- Pembangunan Infrastruktur Kawasan Industri Batang;
- Rehabilitasi Kawasan Industri Palu dan Pirnas;

- Pengembangan dan Pengelolaan KEK Galang Batang.

Kemitraan Usaha

- Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPP) yang Dikembangkan;
- Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan;
- Kawasan Kelapa.

Tata Ruang dan Wilayah

- Rekomendasi Peningkatan Kinerja Kawasan;
- Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang Dikembangkan.

**Pengelolaan Terpadu UMKM**

Major Project ini dilatarbelakangi oleh kontribusi UMKM di Indonesia yang menyumbang sekitar 57% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan memberikan lapangan kerja bagi 97% dari total jumlah pekerja. Namun, meskipun potensinya besar, masih ada sejumlah permasalahan yang perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya integrasi dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM. Selain itu, UMKM menghadapi sejumlah kendala yang mencakup berbagai aspek usaha, mulai dari akses

ke pembiayaan hingga masalah regulasi. Jumlah UMKM yang menjalin kemitraan dengan pihak lain juga masih relatif rendah sehingga menghambat potensi kolaborasi yang dapat meningkatkan daya saing UMKM. Terakhir, meskipun kontribusi UMKM dalam ekonomi nasional signifikan, kontribusi ekspor dari sektor ini masih terbatas, mencapai hanya sekitar 14%.

➤ Impact/outcome

- Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan 22,00%;
- Pertumbuhan wirausaha 2,90%;
- Kontribusi koperasi terhadap PDB 5,50% pada tahun 2024;
- Kontribusi UMKM pada ekspor nonmigas menjadi 17% pada tahun 2024;

➤ Highlight Proyek**Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama**

- UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan *Factory Sharing*;
- UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok;



- Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan;
- IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan.

Kurasi dan Standardisasi

- Usaha Mikro yang mendapat Fasilitas dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk;
- Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/ atau Pengujian.

Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

- Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi;
- Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM;

- Jaringan dan Pemasaran Ekspor yang diperkuat.

Penyediaan Akses Pembiayaan

- Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitas Inkubator Wirausaha;
- Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat.

Pendampingan SDM UMKM

- Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan;
- Fasilitas Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha;
- *Export Coaching Program*.

Regulasi dan Pendataan UMKM

- Pendataan Lengkap KUMKM;
- Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.





Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)

Major Project ini dilatarbelakangi oleh kemungkinan dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh buruk terhadap ketahanan pangan sebagaimana peringatan dini *Food and Agriculture Organization (FAO)* kepada seluruh pemimpin negara. Selain itu, diperkirakan sekitar 820 juta orang telah menderita akibat kekurangan pangan. Terakhir, adanya peningkatan jumlah penduduk disertai peningkatan jumlah kebutuhan pangan.

➤ **Impact/outcome**

- Meningkatkan ketersediaan beras 46,84 juta ton, nasional;
- Produksi jagung 35,27 juta ton, nasional;
- Peningkatan nilai tukar petani 105,00–108,00 nasional pada tahun 2024;
- Peningkatan nilai tambah per tenaga kerja pertanian, Rp59,8 juta/orang/tahun, nasional;
- Tercapainya produksi padi 710 ribu ton GKG di Kalimantan Tengah;
- Meningkatnya produktivitas 5,3%/tahun di Kalimantan Tengah pada tahun 2024;
- Meningkatnya indeks pertanaman (IP) 5%/tahun di Kalimantan Tengah pada tahun 2024.

➤ **Highlight proyek**

Geospasial

- Lahan Pertanian Pangan Produktif (*Food Estate*);
- Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan;
- Bantuan Catu Pangan untuk Transmigran dalam Mendukung Ketahanan Pangan (*Food Estate*);
- SHAT Non Sistematis Kategori 3-Provinsi Kalimantan Tengah;

- PBT Non Sistematis Kategori 3-Provinsi Kalimantan Tengah;
- SHAT Non Sistematis Kategori 3-Provinsi Sumatera Utara;
- SHAT Non Sistematis Kategori 1-Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- PBT Non Sistematis Kategori 1-Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- SHAT Non Sistematis Kategori 4-Provinsi Sumatera Selatan;
- PBT Non Sistematis Kategori 4-Provinsi Sumatera Selatan.

On Farm

- Kawasan Jagung;
- Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan-Provinsi Kalimantan Tengah;
- Irigasi - Tematik Pengembangan Food Estate;
- Pertanian - Tematik Pengembangan Food Estate;
- Kehutanan - Tematik Pengembangan Food Estate;
- Penyaluran Bantuan Benih Padi (MP FE) - Provinsi Kalimantan Tengah.

Off Farm

- Sarana Pascapanen Tanaman Pangan;
- Pembentukan/Pengembangan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis-Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Destinasi Pariwisata Prioritas

Major Project ini dilatarbelakangi oleh belum tercapainya pembangunan pariwisata berkualitas yang berkelanjutan; keterbatasan infrastruktur dasar dan konektivitas serta daya dukung yang kurang berkelanjutan; keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata serta kesiapan industri pariwisata dan masyarakat. Terakhir, investasi di bidang pariwisata belum optimal, sehingga peluang untuk pertumbuhan industri ini belum sepenuhnya dimanfaatkan.

➤ **Impact/outcome**

- Meningkatnya kontribusi PDB sektor pariwisata menjadi 4,50% pada tahun 2024;
- Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 7,38-13,08 miliar US\$ pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1250-1500 juta perjalanan pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,5-14,30 juta kunjungan pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 22,08 juta orang pada tahun 2024;
- Terbangunnya infrastruktur dasar dan aksesibilitas kunci untuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); dan
- Peningkatan proporsi kunjungan wisatawan di 5 DPSP terhadap total kunjungan wisatawan menjadi sebesar 32%.

➤ **Highlight proyek**

Pengembangan Atraksi (Alam, Budaya, Buatan)

- Warisan Geologi dan *Geopark* Nasional yang Ditetapkan;

- Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan;
- Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education* yang Dikembangkan.

Pembangunan Sarana Prasarana Konektivitas Jalan, Darat dan KA

- Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulonprogo;
- Pembangunan Jalan Kawasan Prioritas (ProPN);
- Dukungan KSPN Super Prioritas.

Pengembangan Amenitas Pariwisata

- Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas Pariwisata di Destinasi Pariwisata Prioritas di Wilayah Destinasi I dan II yang Dikembangkan;
- Amenitas dan Aksesibilitas yang dikembangkan di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Pariwisata.

Pengembangan Desa dan BUMDes Berbasis Pariwisata

- Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata;
- Desa Wisata di Destinasi Pariwisata di Wilayah Destinasi I dan II yang dikembangkan.



Pembangunan Sarana Prasarana Konektivitas Laut

- Pemenuhan Kapal Pemburu Cepat (PN).

Pembangunan Sarana Prasarana Konektivitas Udara

- Pengembangan Bandar Udara DEO-Sorong, Papua Barat;
- Pengembangan Bandar Udara Morotai-PN;
- Pengembangan Bandara Sibisa.

Pengembangan Infrastruktur Wilayah

- Akses Internet;
- Kabupaten/Kota Kreatif yang Dikembangkan;
- Penataan Bangunan Kawasan Cagar Budaya dan Permukiman Tradisional.

Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Investasi dan Pemasaran

- *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) pada Destinasi Pariwisata Strategis;

- Potensial investor yang difasilitasi Badan Otorita Danau Toba;
- Penyusunan Kebijakan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Produk kreatif sub sektor Seni Musik, Film, Animasi, Video, Fotografi, Periklanan, Penerbitan, Seni Pertunjukan, Seni Rupa yang Mendapat Pendampingan dan Inkubasi;
- Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan.

Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja;
- SDM dan Industri Pariwisata yang Memperoleh Fasilitas Pengembangan Kompetensi dari Badan Otorita.





Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi

Major Project ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam sektor energi dan lingkungan. Salah satu tantangan utama adalah mencapai target ambisius dalam penggunaan energi terbarukan. Menurut Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), sampai dengan tahun 2022, capaian porsi bauran energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional baru mencapai 12,3%.

Potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 3.686 GW. Pemanfaatan energi terbarukan sampai dengan tahun 2022 baru mencapai 12,5 GW. Selain itu, Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia memiliki lahan perkebunan sawit rakyat seluas 5,8 juta hektar. Tidak hanya itu, intensitas energi final di Indonesia yang merupakan indikator konservasi energi, harus turun sebesar 1% per tahun hingga tahun 2025, sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan RUEN. Serta, upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi harus mencapai 116 juta ton CO₂.

➤ **Impact/outcome**

- Peningkatan porsi energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional menjadi 19,5% pada tahun 2024;
- Penurunan intensitas energi final sebesar 0,8 SBM/miliar Rupiah dan intensitas energi primer sebesar 133,8 SBM/miliar Rupiah; dan
- Penurunan emisi GRK sektor energi sebesar 11,8% terhadap *baseline* (BAU).

➤ **Highlight proyek**

Pembangunan PLT Air

- PLTMH di 5 Provinsi;
- PLTM di Papua;
- Monitoring TKDN Bidang Aneka EBT;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan.

Pembangunan PLT Surya

- PLTS terpadu di 8 Provinsi;
- Monitoring TKDN Bidang Aneka EBT;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan.

Pengembangan Riset dan Inovasi

- Peta Potensi EBT dalam Rangka Percepatan Investasi PLT Bayu, Hidro Biomassa, dan Surya;
- Diklat Masyarakat Bidang KEBTKE;
- Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Sektor Ketenagalistrikan dan EBTKE.

Pembangunan PLT Bioenergi

- Monitoring TKDN Bidang Bioenergi;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan.

Pembangunan Greenfuel

- Volume *Biofuel* untuk Domestik;
- Pembangunan Pabrik Biodiesel Kapasitas 1500 Ton RBDPO/Hari di KEK Sei Mangke.

Pembangunan PLT Panas Bumi

- Penawaran Wilayah Panas Bumi;
- Penetapan Wilayah Panas Bumi;
- Monitoring TKDN Bidang Panas Bumi;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan;



- Pengembangan Panas Bumi di Area:
 1. Patuha Utara, Wilayah Kerja Panas Bumi Daerah Dataran Tinggi Dieng (Jawa Tengah);
 2. Candradimuka, Wilayah Kerja Panas Bumi Daerah Dataran Tinggi Dieng (Jawa Tengah);
 3. Dieng dan Patuha Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Dieng-2 dan Patuha-2.

Peningkatan Kualitas Data Panas Bumi

- Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi.

Standar/Regulasi

- Penurunan Intensitas Energi Final;
- Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi.



Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay

Major Project ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya daerah tertinggal, kondisi geografis dan aksesibilitas yang sulit, kualitas sumber daya manusianya (SDM) yang belum Optimal, serta jumlah penduduk miskin yang tinggi.

➤ Impact/outcome

- Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat Laa Pago sebesar 51,4 dan rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay sebesar 65,2 pada tahun 2025.

➤ Highlight proyek

Infrastruktur Kawasan

- Sarana Air Bersih yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi - Kab. Teluk Wondama.

Produksi Komoditas

- Kawasan Kakao;
- Kawasan Kelapa;
- Kawasan Sagu.

Kampung Terpadu

- Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) - Pusat.

Pariwisata

- Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun untuk Mendukung Destinasi Pariwisata - Kab. Sorong;
- Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education* yang Dikembangkan - Kab. Jayawijaya.

Industri

- Fasilitasi Investor dalam Rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni - Pusat;
- Eksekusi Proyek Wilayah Timur yang Terkendala untuk Percepatan Realisasi Investasi - Pusat.



Energi dan TIK

- OM BTS 4G/*Lastmile* Papua dan Papua Barat - Pusat.

Infrastruktur Jalan

- Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke - Sorong (MP) - Jalan Kampung Muri - Kwatisore (Batas Provinsi Papua);
- Jalan Trans Papua Merauke - Sorong (MP) - Kambuaya - Kumurkeh.

Infrastruktur Bandar Udara

- Pengembangan Bandar Udara Babo - Kab. Teluk Bintuni;
- Pengembangan Bandar Udara Wamena Tahap IV, Jayawijaya, Papua Pegunungan - Wamena (Kab. Jayawijaya);
- Penyelesaian Pembebasan Lahan dan Penyelesaian Penyusunan Masterplan Bandara Wamena.

Angkutan Udara Perintis

- Angkutan Udara Perintis Penumpang - Kota Sorong;
- Angkutan Udara Perintis Kargo (MP) - Kab. Yahukimo;
- Angkutan Udara Perintis Penumpang - Kab. Pegunungan Bintang.

Infrastruktur Permukiman

- Penyediaan Air Baku di Kabupaten Lanny Jaya yang dibangun - Pusat;

- Perluasan SPAM Kabupaten/Kota - Kab. Raja Ampat.

Beasiswa Peserta Didik

- Mahasiswa yang Mendapatkan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) - Pusat;
- Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) - Pusat.

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

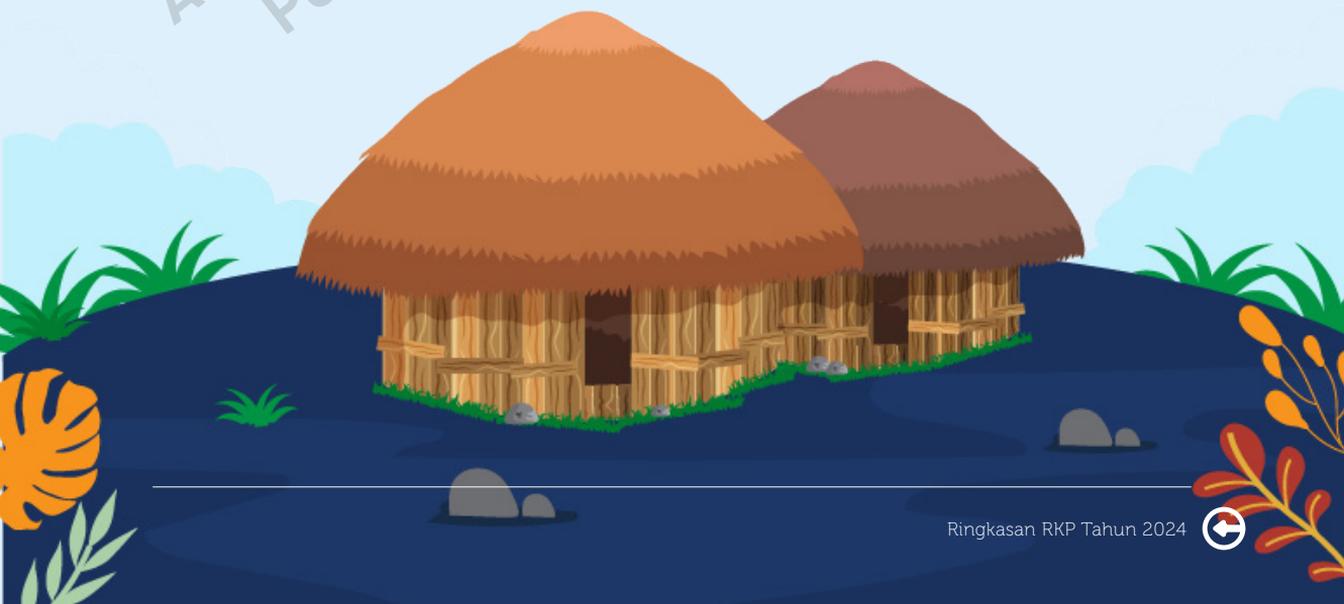
- Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten - Kota Sorong;
- Pelatihan Peningkatan Produktivitas - Kota Sorong;
- Diklat Pemberdayaan Masyarakat Bidang Transportasi Laut (Prioritas Nasional) - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG;
- PBK UPTP - Kota Sorong.

Tenaga Medis

- Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Tatalaksana Program Kesehatan Jiwa (LP-1) - Provinsi Papua Pegunungan.

Beasiswa

- Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Papua dan Papua Barat (SDM-21) - Pusat





Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Mengatasi kesenjangan KBI dan KTI, serta menurunkan beban Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabek), Pulau Jawa, dan KBI yang mendominasi pertumbuhan ekonomi dan *share* pembangunan di Indonesia,

➤ *Impact/outcome*

- Peningkatan laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan 5,1-5,6% pada tahun 2024 (*baseline* 2019: 4,96%).

➤ *Highlight proyek*

Regulasi dan Kebijakan

- Rekomendasi Kebijakan Pengawasan/Pengendalian Desain Sistem Keamanan Ibu Kota Negara Baru;
- Rekomendasi Pengawasan/Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi di Ibukota Negara Baru;
- Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Aset di Jakarta dalam Rangka Pemindahan IKN (PN).

Penyiapan Lahan

- Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya;
- Area IKN yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem;
- Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup (IKN).

Perencanaan Kawasan dan Infrastruktur

- Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik (IKN);
- Peta Zona Nilai Tanah (Hektar) - Provinsi Kalimantan Timur;
- Rekomendasi Kebijakan terkait Penyelenggara Pos di IKN;
- Sistem Transportasi Ibu Kota Nusantara.

Pengamanan

- Pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) (PN).

Sumber Daya Manusia

- Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN - Pusat;
- Surveilans dan Mitigasi Penemuan Kasus dalam Upaya Percepatan Eliminasi Malaria di IKN (LP-9) - Pusat;
- Diseminasi Informasi Pemindahan Ibu Kota Negara - Pusat.

Infrastruktur

- Pembangunan IKN;
- Rumah Tapak Jabatan Menteri (IKN);
- Pembangunan SPAM IKN.



MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Major project ini dilatarbelakangi oleh Ketepatan sasaran program bantuan sosial yang masih rendah, rata-rata akurasi pelaksanaan program bantuan sosial tahun 2022 sebesar 41,87%, menurun dari tahun 2021 sebesar 44,66% (Susenas, Maret 2022). Selain itu, angka kemiskinan ekstrem masih tinggi terlihat dari penduduk miskin ekstrem pada Maret 2020 sebesar 3,8% (10,4 juta jiwa) dan terus menurun di Maret 2022, angka kemiskinan ekstrem (2,15 US\$ PPP) menjadi 2,5%

(6,8 juta jiwa) dari total penduduk Indonesia. Kemudian, Cakupan program jaminan sosial masih terbatas, tercatat Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional per bulan Januari 2023 sebesar 92,11%.

➤ **Impact/Outcome**

- Penurunan angka tingkat kemiskinan menjadi 6,5-7,5% pada tahun 2024;
- Penurunan angka penduduk miskin ekstrem menjadi 0-1% pada tahun 2024;
- Akurasi penyaluran bantuan sosial mencapai 60% pada tahun 2024; dan
- Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 98% pada tahun 2024.

➤ **Highlight Proyek**

Pengelolaan data

- Pelayanan koneksitas Warehouse berbasis NIK Nasional.

Integrasi Data dan Perluasan Kepesertaan

- Cakupan penduduk yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) dalam JKN/KIS.

Penguatan Skema Integrasi Perlindungan Sosial

- Keluarga yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat.

Peningkatan Cakupan Data dari Desa/ Kelurahan

- Pendampingan Desa.

Transformasi Bantuan Sosial menjadi Adaptif

- Pemetaan Risiko Bencana.

Digitalisasi Penyaluran dan Inovasi Skema Pendanaan

- Literasi Digital.

Peningkatan Akses dan Aset Usaha

- KPM yang Dirujuk untuk Mendapatkan Program Pendampingan Usaha.

Peningkatan Keterampilan dan Kesempatan Kerja

- Transformasi BLK.

Peningkatan Akses Infrastruktur Dasar

- Distribusi Logistik dan Peralatan PB.

Pemberdayaan Komunitas

- Pemberdayaan PMI Purna dan Keluarganya.

Sinkronisasi dan Integrasi Data

- Sistem Informasi Bidang Kebencanaan.





Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Major project ini dilatarbelakangi oleh Pencapaian target pembangunan kesehatan yang masih belum optimal. Kasus baru TB tertinggi ke-2 di dunia; 142 kab/kota belum eliminasi malaria; Faktor risiko penyakit tidak menular tinggi. Selain itu, Kerentanan sistem kesehatan nasional juga masih terjadi. *Screening test* dan *tracing* masih terbatas, sistem surveilans belum terintegrasi dan belum *real-time*, fasyankes, kefarmasian, dan alkes tidak siap, kapasitas tenaga Kesehatan terbatas, dan pembiayaan Kesehatan belum efisien.

➤ **Impact/outcome**

- Menurunnya insidensi tuberkulosis menjadi 297/100.000 penduduk pada tahun 2024;
- Puskesmas tanpa dokter menjadi 0% pada tahun 2024;
- Tercapainya pemenuhan 42 RS Rujukan Nasional melalui pengembangan 5 layanan unggulan berbasis kompetensi, yaitu kanker, kardiovaskuler, stroke, uronefropati, dan pelayanan ibu dan anak pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah kab/kota eliminasi malaria menjadi 405 kab/kota pada tahun 2024;
- Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan menjadi 90% pada tahun 2024;
- Meningkatnya puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebanyak 83% puskesmas pada tahun 2024;
- Meningkatnya ketersediaan minimal 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya di 90% RSUD kab/kota pada tahun 2024;
- Terakreditasinya 100% FKTP dan 100% RS pada tahun 2024;

- Terwujudnya integrasi dan digitalisasi sistem informasi surveilans menjadi 100% pada tahun 2024.

➤ **Highlight Proyek**

Penguatan Keamanan dan Ketahanan Kesehatan

- Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Infeksi Emerging;
- Peningkatan Kapasitas Labkesda.

Peningkatan Kapasitas RS dan pelayanan Kesehatan di DTPK

- Pengembangan Fasilitas Rujukan Kawasan Indonesia Timur.

Kemandirian Farmasi dan alat kesehatan

- Pendampingan Sertifikasi TKDN dan Manajemen Mutu Alat Kesehatan Dalam Negeri;
- Pengembangan Vaksin Non-EPI.

Pendidikan dan Penempatan Tenaga Kesehatan

- Pendayagunaan Dokter Spesialis.

Penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

- Dukungan Peningkatan Mutu, Akreditasi, Keselamatan Pasien di FKTP;

- Dukungan Peningkatan Pemenuhan Standar SPA Puskesmas dan Klinik Pratama;
- Revitalisasi Puskesmas Pembantu di Tingkat Desa;
- Penguatan Sistem Kesehatan.

Inovasi Pembiayaan Kesehatan

- Sinergisme Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Pembiayaan Kesehatan.

Pengendalian Penyakit dan Perluasan Imunisasi

- Sarana dan Prasarana serta Logistik dalam Pengendalian TBC.

Digitalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat

- Integrasi dan Pengembangan Sistem Data Kesehatan.



Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

Major project ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, dan adaptif yang belum dapat dipenuhi dengan baik. Selain itu, kondisi Industri 4.0 menjadi salah satu isu global yang harus diadopsi di Indonesia untuk meningkatkan daya saing.

➤ Impact/outcome

- Meningkatnya proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi menjadi 43,10% pada tahun 2024;
- Meningkatnya lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan menjadi 40,95% pada tahun 2024.

➤ Highlight Proyek

Penguatan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Vokasi

- Pendidikan Tinggi Vokasi yang Menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri.

Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik

- SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi.

Peningkatan Kompetensi dan Keahlian Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi

- Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi yang Mengikuti Uji Kompetensi Profes.

Revitalisasi SMK

- SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0.

Reformasi Kelembagaan

- Transformasi BLK.

Revitalisasi Sistem Informasi Pasar Kerja

- Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SIAP Kerja;
- Layanan Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- Layanan Analisis Kebutuhan Pelatihan Kerja Dalam Negeri/Luar Negeri;
- Layanan Perantara Kerja.





Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting

Major project ini dilatarbelakangi oleh Angka kematian ibu (AKI) terus mengalami penurunan namun masih tergolong tinggi di tingkat global. Selain itu, Prevalensi *stunting* masih tinggi, yaitu 21,6% (2022) sehingga diperlukan percepatan penurunan sebesar 3,8%/tahun untuk mencapai target RPJMN 14%.

➤ **Impact/outcome**

- Menurunkan Angka Prevalensi *Stunting* pada Balita menjadi 14% dan Wasting Balita Menjadi 7% pada Tahun 2024;
- Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) hingga 183 Per 100.000 Kelahiran Hidup. pada Tahun 2024.

➤ **Highlight Proyek**

Stunting:

Peningkatan Cakupan, Kualitas, dan Compliance Intervensi Spesifik

- Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang yang mendapat Makanan Tambahan;
- Suplementasi Gizi Mikro pada Balita Gizi Kurang;
- Penyediaan dan Konsumsi Tablet Tambah Darah untuk Ibu Hamil dan Remaja Putri;

Pemenuhan Intervensi Sensitif Kunci pada Sasaran Prioritas

- KPM yang memperoleh Bantuan Sosial Sembako;
- Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat.

- Keluarga dengan Baduta yang mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan 1000 HPK;
- Kegiatan Surveilans Gizi dan KIA.

AKI:

Penguatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Maternal

- Pemerintah Daerah yang mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pascapersalinan;
- Faskes yang Terpenuhi Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi;
- Provinsi yang mendapatkan Bimbingan Teknis dalam Peningkatan Pelayanan KB Pasca Persalinan;
- Tenaga Kesehatan/Non Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Terkait Surveilans Gizi dan KIA;
- Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting*.



Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)

MP Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) dilatarbelakangi oleh akses air minum jaringan perpipaan merupakan sistem penyediaan air minum yang lebih menjamin layanan air minum yang berkualitas untuk masyarakat. Hingga tahun 2022, hanya 19,47% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum perpipaan, sehingga diperlukan percepatan penyediaan air minum melalui *Major Project* Akses Air Minum Perpipaan (10 juta sambungan rumah).

➤ *Impact/outcome*

- Meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum perpipaan dari 19,47% pada tahun 2022 menjadi 25,53% pada tahun 2024.

➤ *Highlight Proyek*

Pengembangan SPAM Regional

- Pembangunan SPAM Regional;

- Perluasan SPAM Regional;
- SPAM Regional Karian Serpong.

Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota

- Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota;
- Perluasan SPAM Kabupaten/Kota;
- Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota.



Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)

MP Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga) dilatarbelakangi oleh perlunya penyediaan sanitasi yang terkelola dengan aman untuk mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kesehatan lingkungan. Namun hingga tahun 2022, terdapat 5,86% rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), selain itu prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita yang masih tinggi sebesar 21,6% pada tahun 2022.

➤ *Impact/outcome*

- Terlayannya 1.730.314 rumah tangga (113 Kab/Kota) oleh IPLT pada tahun 2024;
- Meningkatkan jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman mencapai 86% Rumah Tangga;

- Menurunnya persentase jumlah rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka menjadi 3%;
- Penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita menjadi 14%.



➤ **Highlight Proyek**

Terpusat

- SPALD-T Skala Kota.

Setempat

- SPALD-S Skala Kota.

Kelembagaan

- Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi;
- Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu.

Lingkungan

- Data dan Informasi Beban Pencemaran yang Diturunkan dari IPAL Domestik, IPLT, dan *Leachate* TPA.



Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu dilatarbelakangi oleh pelabuhan simpul peti kemas domestik di pelabuhan utama belum memiliki standar kinerja yang sama. Selain itu, kawasan industri dan kawasan strategis (*hinterland*) dengan pelabuhan utama belum sepenuhnya terkoneksi dengan infrastruktur konektivitas yang memadai dan belum adanya sistem data untuk mempercepat proses administrasi pelayanan kapal.

➤ **Impact/outcome**

- Meningkatnya persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*) di tahun 2024 sebesar 27% dari total pelayaran nasional;
- Pelabuhan utama yang memenuhi standar: Tanjung Priok, Bitung, Makassar, Kijing, Tanjung Perak, Kuala Tanjung dan Patimban;
- Terbangunnya Pelabuhan Patimban;
- Pengembangan Pelabuhan Tj Priok, Makassar, Kijing, dan Sorong;

- Terbangunnya Jalan Tol Akses Patimban, Jalan Akses Pel. Tj. Priok.

➤ **Highlight Proyek**

Standardisasi Pelabuhan

- Pembangunan Pelabuhan Patimban (I);
- Optimalisasi Pelabuhan Sorong.

Konektivitas Integrasi dengan Hinterland

- Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - Akses Tol Patimban;
- Pembangunan *New Priok Eastern Access*.





Transformasi Digital

Major Project Transformasi Digital ini sebagai upaya untuk memperluas pemanfaatan platform layanan elektronik *e-commerce*, *e-learning*, dan *e-health* yang efisien dikarenakan terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau jaringan serat optik ditandai dengan adanya *Optical Distribution Point*. Selain itu juga masih terdapat Ketidakmerataan akses dan infrastruktur TIK karena adanya *shifting customer behavior* ke digital, kurang optimalnya pemanfaatan TIK dalam bidang pemerintahan, UMKM, *e-commerce*, dan masih rendahnya keamanan & ketahanan siber.

➤ *Impact/outcome*

- 100% desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan *mobile broadband* pada 2024, 90% sekolah terlayani internet dengan tujuan menunjang pembelajaran pada tahun 2024, dan 100% standardisasi dan integrasi data sistem fasilitasi pelayanan kesehatan pada Platform Satu Sehat;
- Tersedianya 5.025 BTS USO 4G *On Air*.

➤ *Highlight Proyek*

Penyediaan Akses Internet Cepat

- OM Satria menjadi OM Satria 1;
- Proyek Revitalisasi Palapa Ring Rute Manado – Ondong Siau;
- Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut SUB – 2.

Pengembangan Penyiaran Digital

- Prasarana *Digital Broadcasting System*.

Frekuensi dan Perangkat TIK

- Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR).

Pusat Data Nasional

- *Data Center* Nasional;
- Pembangunan Lanjutan *Data Center* Batam.

Penerapan SBPE Terintegrasi

- Aplikasi Generik Berbasis *Cloud* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE).

Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (E-Service) Terintegrasi

- Pengembangan *Land Registration Information System* (Sistem Informasi Pertanahan Modern (SIPM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional).

Pemanfaatan TIK untuk Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

- Platform Digital Pendidikan Merdeka Belajar.

Peningkatan Literasi Masyarakat

- Fasilitasi Literasi Digital.

Digitalisasi UMKM

- Usaha Ekraf yang Bertransformasi Digital.

Desa Digital

- Rekomendasi Pengembangan Desa Digital Melalui *Smart Village*.



Start Up Digital

- Startup Digital yang Dikembangkan.

E-Commerce

- Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Pertanian.

Pembangunan Pertahanan Siber

- Siber.

Penguatan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber

- *Integrasi Cyber Intelligent Analytics (CIA).*

Pembangunan dan Penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber

- Pembentukan tim Respon Ancaman Intelijen Siber.

Penyelesaian Kejahatan Siber

- Penanganan Tindak Pidana Siber (PN).

Pengembangan Ekosistem Inovasi, Infrastruktur Digital, dan Insentif Investasi Teknologi

- Percepatan Pengembangan Digital PLN.

Peningkatan Kompetensi SDM pada Bidang TIK

- *Digital Talent Scholarship.*

Kebijakan pada Standardisasi Kompetensi pada Bidang TIK

- Sertifikasi SDM Bidang Ekonomi Kreatif.

Vokasi untuk Industri 4.0

- Tenaga Kerja Industri 4.0.





Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

Major Project ini dilatarbelakangi oleh tingginya timbulan limbah B3. Limbah B3 medis tersebut meningkat selama pandemi. Sementara itu, fasilitas pengolahan limbah B3 masih minim dan belum merata.

➤ **Impact/outcome**

- Mendukung pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menuju 69,74 pada tahun 2024;
- Meningkatkan kapasitas terpasang pengolahan limbah B3 sebesar \pm 26.880 ton pada tahun 2024;
- Terbangunnya fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan sejumlah 18 unit pada tahun 2024;
- Terbangunnya fasilitas pengolahan limbah B3 terpadu sebanyak 3 unit di tahun 2024.

➤ **Highlight Proyek**

Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis

- Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dari Fasyankes;
- Belanja Modal Tanah.

Enablers

- Kab/kota yang Dibina Dalam Pemenuhan Kualitas Kesehatan Lingkungan.

Pembangunan Fasilitas Pengolahan B3 Terpadu

- Persiapan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Sampah Spesifik Secara Terpadu.

Enablers

- Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Sektor Industri.



PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS NASIONAL 1

Kebijakan pembangunan pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian; industri pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi; peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT); pemanfaatan digitalisasi; dan ekonomi hijau. Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Sasaran, Indikator, dan Target PN 1

No.	Sasaran/Indikator	Target 2024
1.	Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan	
1.1	Porsi EBT dalam bauran energi primer nasional (%)	19,5
1.2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,20
1.3	Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan (WPP)	11
2.	Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan saing ekonomi	
2.1	Rasio kewirausahaan nasional (%)	3,23 ^{a)}
2.2	Pertumbuhan PDB pertanian (%) ^{b)}	3,4-3,8
2.3	Pertumbuhan PDB perikanan (%)	5,00-7,00
2.4	Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)	5,4-5,8
2.5	Kontribusi PDB industri pengolahan (%)	19,9-20,5
2.6	Nilai devisa pariwisata (miliar US\$)	7,38-13,08
2.7	Kontribusi PDB pariwisata (%)	4,50
2.8	Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	2,7-3,0

No.	Sasaran/Indikator	Target 2024
2.9	Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	6,2-7,0
2.10	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	10,10
2.11	Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	7,2-7,9
2.12	Tingkat inflasi umum (%)	1,5-3,5
2.13	Rasio perpajakan terhadap PDB (%)	10,11
2.14	Laju pertumbuhan PDB/tenaga kerja (%)	3,7-4,5

Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024; dan Pemutakhiran RKP Tahun 2023.

Keterangan: a) Penyesuaian target Rasio Kewirausahaan Nasional Tahun 2023 - 2024 sesuai dengan hasil *exercise* Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan capaian tahun 2020-2021 yang kurang dari target akibat pandemi COVID-19; dan b) Indikator pertumbuhan Produk Domestik Bruto pertanian mencakup pertumbuhan Produk Domestik Bruto pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, akan dilakukan melalui delapan Program Prioritas.



- 1 PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- 2 PP Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
- 3 PP Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan
- 4 PP Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan
- 5 PP Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi
- 6 PP Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi
- 7 PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- 8 PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi



➤ **Major Project**

Dalam PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan telah disusun sembilan MP sebagai langkah konkret pencapaian sasaran, yaitu

1. MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi;
2. MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
3. MP Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional;
4. MP Penguatan Jaminan Usaha dan 350 Korporasi Petani dan Nelayan;
5. MP Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng;
6. MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
7. MP Industri 4.0 di 7 Subsektor Industri Prioritas;
8. MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter; dan
9. MP Destinasi Pariwisata Prioritas.

➤ **Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, meliputi

- (1) Rancangan regulasi yang diarahkan masuk dalam Program legislasi nasional/ Program penyusunan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden Tahun 2024, terdiri dari
 - (a) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Halmahera;

- (b) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Seram;
- (c) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera; dan
- (d) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Aru.

- (2) Rancangan regulasi yang sedang dalam proses persiapan (baik dalam tahap penyusunan kajian, draf regulasi, pembahasan, dan lain sebagainya) sepanjang tahun 2024, terdiri dari
 - (a) Rancangan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistika;
 - (b) Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian dan peraturan turunannya;
 - (c) Rancangan Peraturan Pemerintah Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja;
 - (d) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Wakatobi;
 - (e) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cendrawasih;
 - (f) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Utara Papua; dan
 - (g) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital.

PRIORITAS NASIONAL 2

Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

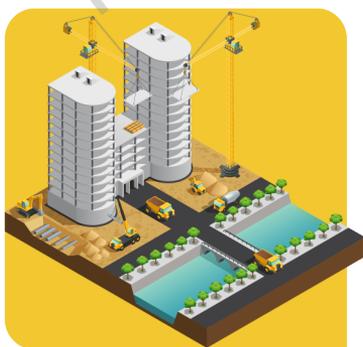
Sasaran, Indikator, dan Target PN 2

No.	Sasaran/Indikator	Target 2024 ^{a)}
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	
1.1	Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI (%/tahun)	6,0-6,9
1.2	IPM KTI (nilai min-maks)	62,46-78,80
1.3	Persentase penduduk miskin KTI (%)	9,00-9,50
2	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	
2.1	Laju pertumbuhan PDRB KBI (%/tahun)	5,2-5,5
2.2	IPM KBI (nilai min-maks)	71,23-82,57
2.3	Persentase penduduk miskin KBI (%)	7,00-7,50

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Keterangan: a) Assessment Kementerian PPN/Bappenas.

Kerangka Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dijabarkan ke dalam tujuh Program Prioritas.



- 1 PP Pembangunan Wilayah Sumatera
- 2 PP Pembangunan Wilayah Jawa-Bali
- 3 PP Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
- 4 PP Pembangunan Wilayah Kalimantan
- 5 PP Pembangunan Wilayah Sulawesi
- 6 PP Pembangunan Wilayah Maluku
- 7 PP Pembangunan Wilayah Papua

➤ Major Project

Pada tahun 2024, perencanaan dan penganggaran PN 2 akan difokuskan pada pelaksanaan delapan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* yakni

1. Pembangunan Wilayah Batam-Bintan;
2. Pengembangan Wilayah (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar;
3. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
4. Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong;
5. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay;
6. Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda;

7. PKSN Kawasan Perbatasan Negara; dan
8. Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria).

➤ Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan adalah

1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029;
2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah Ibu Kota Nusantara.

PRIORITAS NASIONAL 3

Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan sumber daya manusia tahun 2024 difokuskan pada percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial. Sasaran yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Sasaran, Indikator, dan Target PN 3

No.	Sasaran/Indikator	Target 2024
1	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	
1.1	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) (rata-rata kelahiran per perempuan usia 15-49 tahun)	2,10
1.2	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	100,00

No.	Sasaran/Indikator	Target 2024
2	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	
2.1	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%)	
2.1.1	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	98,00
2.1.2	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	80,00
2.2	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0-1
3	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	183
3.2	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	16,00
3.3	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12–23 bulan (%)	90,00
3.4	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	14
3.5	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	7
3.6	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	297 ^{d)}
3.7	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	405
3.8	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (kabupaten/kota)	469
3.9	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	21,80
3.10	Persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun (%)	8,70
3.11	Nilai rata-rata hasil PISA:	
3.9.1	Membaca	396
3.9.2	Matematika	388
3.9.3	Sains	402
3.12	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,29
3.13	Harapan lama sekolah (tahun)	13,30
4	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	
4.1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	73,49
4.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,24–91,54
4.3	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	57,67



No.	Sasaran/Indikator	Target 2024
5	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	
5.1	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (%)	40,00
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	
6.1	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	49,75
6.2	Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	43,10
6.3	Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> (PT):	
6.2.1	Top 200	1
6.2.2	Top 300	2
6.2.3	Top 500	3
6.4	Peringkat <i>Global Innovation Index</i>	75-80
6.5	Peringkat pada Olympic Games	30 ¹⁾
6.6	Peringkat pada Paralympic Games	40 ²⁾

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022; 1) Olympic Games Paris 2024; 2) Paralympic Games Paris 2024.

Keterangan: a) Angka target penyesuaian.

Pencapaian sasaran PN Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing dilakukan melalui tujuh Program Prioritas.



- 1 PP Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
- 2 PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
- 3 PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
- 4 PP Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
- 5 PP Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
- 6 PP Pengentasan Kemiskinan
- 7 PP Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

➤ Major Project

Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing telah disusun lima MP sebagai langkah konkret dalam pencapaian sasaran, yaitu

1. MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*;
2. MP Pembangunan *Science Technopark* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 *Major* Universitas);
3. MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0;
4. MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial; dan
5. MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.

➤ Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

1. Rancangan regulasi yang diarahkan masuk dalam program legislasi nasional/program penyusunan peraturan pemerintah/peraturan presiden tahun 2024, terdiri dari
 - (a) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Kesehatan.
2. Rancangan regulasi yang sedang dalam proses persiapan (baik dalam tahap penyusunan kajian, draf regulasi, dan lain sebagainya) sepanjang tahun 2024 terdiri dari
 - (a) Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan;
 - (b) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
 - (c) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan.

PRIORITAS NASIONAL 4

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan melalui pendayagunaan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Sasaran, Indikator, dan Target PN 4

No.	Sasaran/Indikator	Target 2024
1	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	
1.1	Indeks Capaian Revolusi Mental	74,29
1.2	Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila	76,33 ^{a)}



No.	Sasaran/Indikator	Target 2024
2	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	
2.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,70
3	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	
3.1	Indeks Pembangunan Masyarakat	0,65
4	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	
4.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75,80
5	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	
5.1	Indeks Pembangunan Keluarga	61,00
5.2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)	22,10
6	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	
6.1	Nilai Budaya Literasi	71,04

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemenag, BKKBN, BPS, BPIP, 2019–2023.

Keterangan: a) Berdasarkan metode baru (ada penajaman indikator).

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dilakukan melalui empat Program Prioritas.



- 1  PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila
- 2  PP Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
- 3  PP Memperkuat Moderasi Beragama
- 4  PP Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas

PRIORITAS NASIONAL 5

Pembangunan infrastruktur tahun 2024, sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas karena memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut. Sasaran dan indikator utama PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Sasaran, Indikator, dan Target PN 5

No.	Sasaran/Indikator	Target 2024
1	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	
1.1	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	63,41
1.2	Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	65
1.3	Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif, %)	0,50
1.4	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, %)	68,95
2	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	
2.1	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km)	2,03 ^{a)}
2.2	Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>) (%)	27
2.3	Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	94
2.4	Persentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi udara (%)	90
3	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	
3.1	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	6
3.2	Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan (%)	65,34
4	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	
4.1	Rasio elektrifikasi (%)	~100 ^{b)}
4.2	Rata-rata pemenuhan kebutuhan (Konsumsi) listrik (kWh/Kapita)	1.400
4.3	Penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton)	142
5	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	
5.1	Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) (%)	100

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Keterangan: a) Angka berdasarkan usulan Rencana Kerja 2024 dan b) mendekati 100.



Pencapaian sasaran PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dilakukan melalui lima Program Prioritas.



- 1 PP Infrastruktur Pelayanan Dasar
- 2 PP Infrastruktur Ekonomi
- 3 PP Infrastruktur Perkotaan
- 4 PP Energi dan Ketenagalistrikan
- 5 PP Transformasi Digital

➤ Major Project

Dalam mendukung pencapaian sasaran PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, telah dirancang *Major Project* sebagai berikut

1. MP Rumah Susun Perkotaan (1 Juta);
2. MP Akses Air Minum Perpipaian (10 Juta Sambungan Rumah);
3. MP Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga);
4. MP Pemulihan 4 DAS Kritis;
5. MP 18 Waduk Multiguna;
6. MP Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa;
7. MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu;
8. MP Kereta Api Makassar-Pare Pare;
9. MP KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (*Medium Speed* Jakarta-Semarang dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung);
10. MP Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung;
11. MP Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan;
12. MP Jalan Trans Papua Merauke-Sorong;
13. MP Jembatan Udara 37 Rute di Papua;
14. MP Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar;
15. MP Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 Megawatt (MW), Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 Mega Volt Ampere (MVA);
16. MP Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah;
17. MP Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak; serta
18. MP Transformasi Digital.

➤ Kerangka Regulasi

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada tahun 2024 sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang meliputi

- (1) Rancangan regulasi yang diarahkan masuk dalam Program legislasi nasional/ Program penyusunan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden Tahun 2024, adalah Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan; dan
- (2) Rancangan regulasi yang sedang dalam proses persiapan (baik dalam tahap penyusunan kajian, draf regulasi, pembahasan, dan lain sebagainya) sepanjang tahun 2024, terdiri dari
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Urusan Persampahan); dan
 - Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pencapaian Air Minum dan Sanitasi Aman.

PRIORITAS NASIONAL 6

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana, dan upaya mengantisipasi perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, serta pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2024, sasaran yang akan dicapai dalam membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Sasaran, Indikator, dan Target PN 6

No.	Sasaran/Indikator	Target 2024
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,74
2	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	
2.1	Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	1,25
3	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap <i>baseline</i>	
3.1	Persentase penurunan emisi GRK (%)	
	a. Kumulatif	27,27
	b. Tahunan	27,30
3.2	Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	31,64

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.



Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim terdiri atas tiga Program Prioritas.



- 1  PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- 2  PP Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
- 3  PP Pembangunan Rendah Karbon

➤ Major Project

Dalam PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim disusun 2 (dua) MP yaitu

1. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
2. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana

➤ Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang diperlukan dan direncanakan dilaksanakan di tahun 2024 untuk mendukung PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim antara lain

1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia Pasca 2020 (*Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP Post 2020*).

PRIORITAS NASIONAL 7

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas Aparatur Sipil Negara, pemindahan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Nusantara, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak. Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dapat dilihat pada tabel dibawah ini..

Sasaran, Indikator, dan Target PN 7

No.	Sasaran/Indikator	Target 2024
1	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	
1.1	Indeks Demokrasi Indonesia ¹⁾	82,48
1.2	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah ²⁾ (%)	81
2	Optimalnya kebijakan luar negeri	
2.1	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional ³⁾	4,94 ^{a)}
3	Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap	
3.1	Indeks Pembangunan Hukum	0,58 ^{b)}
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
4.1	Indeks Pelayanan Publik Nasional ⁴⁾	4,00
5	Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	
5.1	Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya (%) ⁵⁾	100

Sumber: 1) BPS; 2) Kemenkominfo; 3) Kemenlu; 4) Kemen PANRB; 5) Kemenhan.

Keterangan: a) Indeks Peran dan Pengaruh Indonesia tahun 2022–2024 mengalami penyempurnaan formulasi penghitungan dengan konversi indeks berdasarkan skala guna mencerminkan tingkatan peran dan pengaruh dalam indeks, b) Realisasi tahun 2022 merupakan prognosa capaian. Penghitungan IPH pada tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data dan penghitungan, kerangka berpikir melalui pilar, variabel dan indikator yang baru dan berbeda dengan IPH pada tahun 2015–2019 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan nilai capaian IPH 2019, penghitungan nilai Indeks Pembangunan Hukum (IPH) 2021 dilakukan pada tahun 2022,.

Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik terdiri atas lima Program Prioritas.



- 1  PP Konsolidasi Demokrasi
- 2  PP Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
- 3  PP Penegakan Hukum Nasional
- 4  PP Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- 5  PP Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

➤ Major Project

Di dalam PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, terdapat dua *Major Project*, yaitu

1. MP Penguatan *National Security Operation Center* (NSOC)-*Security Operation Center* (SOC) dan Pembentukan *121 Computer Security Incident Response Team* (CSIRT), serta
2. MP Penguatan Keamanan Laut di Natuna.

➤ Kerangka Regulasi

Kebutuhan regulasi pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik pada tahun 2024 sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam RPJMN 2020–2024, yang meliputi

- (1) Rancangan regulasi yang diarahkan masuk dalam Program legislasi nasional/ Program penyusunan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden Tahun 2024, terdiri dari
 - (a) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional;
 - (b) Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; dan
 - (c) Rancangan Peraturan Presiden tentang Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.
- (2) Rancangan regulasi yang sedang dalam proses persiapan (baik dalam tahap penyusunan kajian, draf regulasi, pembahasan, dan lain sebagainya) sepanjang tahun 2024, terdiri
 - (a) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
 - (b) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
 - (c) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
 - (d) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - (e) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 - (f) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
 - (g) Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha;
 - (h) Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak;
 - (i) Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut; dan
 - (j) Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber.

Alokasi Prioritas Nasional

Alokasi pada Prioritas Nasional Tahun 2024

No.	Prioritas Nasional	Indikasi Pendanaan (Rp. Triliun)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	59,4
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	61,9
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	271,1
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	8,5
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	151,0
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	7,2
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	72,8

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

catatan: a) Sesuai dengan Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu PN; b) Alokasi Prioritas Nasional mencakup rincian belanja Kementerian/Lembaga, Dana Alokasi Khusus, dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Belum memperhitungkan Investasi Badan Usaha (Badan Usaha Milik Negara atau Swasta).



KERANGKA EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Kerangka Evaluasi

Tujuan evaluasi pelaksanaan RKP

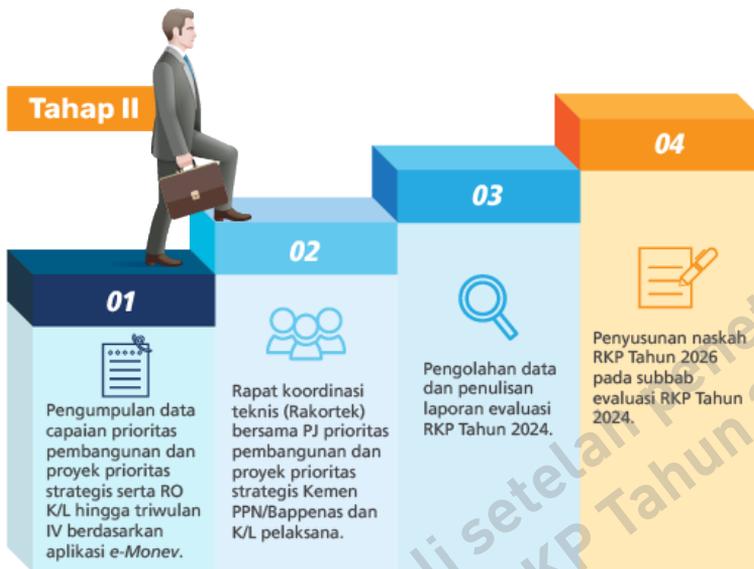
1. menilai pencapaian kinerja pembangunan, mencakup kinerja pelaksanaan prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis;
2. memberi umpan balik bagi proses perencanaan berikutnya, berupa bahan perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan ke depan, termasuk perumusan tema pembangunan pada RKP Tahun 2026.

Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 disusun berdasarkan tujuh Prioritas Nasional yang sesuai dengan Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan dan evaluasi.

Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 tahap I (evaluasi saat pelaksanaan/on going), merupakan tahapan evaluasi kinerja pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan data capaian pelaksanaan pembangunan hingga triwulan III tahun 2024.



Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 tahap II (evaluasi pascapelaksanaan/ex-post), merupakan tahapan evaluasi kinerja pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data capaian pelaksanaan pembangunan hingga akhir tahun 2024.



Kerangka Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Tujuan kerangka pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan adalah untuk (a) Menggali data dan informasi kemajuan pencapaian pelaksanaan prioritas pembangunan dan/atau proyek prioritas strategis secara berkala, (b) menjaga pelaksanaan prioritas pembangunan dan/atau proyek prioritas strategis agar dapat

berjalan sesuai dengan rencana atau *on-track* melalui pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi, serta (c) memastikan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut atas permasalahan dan hambatan yang akan terjadi dan/atau telah terjadi dalam pencapaian program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan/proyek prioritas strategis dalam RKP.

Alur Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Tahun Berjalan





Kementerian PPN/
Bappenas

RINGKASAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310



(021) 31936207

www.bappenas.go.id